

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

“*Tidak ada perdamaian di antara bangsa-bangsa tanpa perdamaian di antara agama-agama; tidak ada perdamaian di antara agama-agama tanpa dialog antaragama*”.<sup>1</sup> Pernyataan ini merupakan tesis dasar Hans Küng dalam perumusan naskah etik global demi mewujudkan perdamaian dunia. Pernyataan Hans Küng tersebut merupakan suatu bentuk keprihatinan terhadap persoalan yang berkaitan dengan konflik antaragama yang tetap menjadi masalah aktual hingga saat ini. Menurut Küng, agama mampu memberikan sumbangsih bagi perdamaian dunia. Akan tetapi, agama dewasa ini telah menjadi suatu paradoks. Di satu pihak, agama dialami sebagai jalan dan penjamin keselamatan, cinta dan perdamaian. Di pihak lain, agama justru menjadi sumber serta alasan kehancuran kehidupan umat manusia.<sup>2</sup>

Di dalam perkembangan dan kemajemukan dunia saat ini, tidak dapat disangkal bahwa agama merupakan suatu kekuatan paling dahsyat dan meresap dalam masyarakat manusia. Agama menjadi suatu fakta sejarah, serta suatu realitas yang membentuk komunitas dunia pada masa kini dan masa depan. Dapat disaksikan pada masa sekarang, di mana agama menjadi kekuatan yang mampu menggerakkan banyak orang dan kepentingan. Selain itu, agama juga meresap dalam setiap kebudayaan manusia dan mampu melahirkan aneka persesuaian bahkan juga gesekan. Dengan demikian, tidak heran jika agama menjadi fakta menarik yang terus diangkat untuk diperbincangkan secara serius.<sup>3</sup>

Sebagaimana disinggung bahwa agama merupakan suatu paradoks, besar harapan bahwa paradoks tersebut bisa berjalan secara seimbang. Namun kenyataan berkata lain. Pada awal milenium baru ini, agama justru memperjelas sisi negatifnya. Peristiwa 11 September 2001 seakan-akan hadir membawa pesan

---

<sup>1</sup> Joas Adiprasetya, *Mencari Dasar Bersama; Etik Global Dalam Kajian Postmodernisme dan Pluralisme Agama* (Jakarta: Gunung Mulia, 2002), hlm. 97.

<sup>2</sup> Dr. Sindhunata, “Pengantar” dalam Charles Kimbal, *Kala Agama Jadi Bencana*, penerj. Nurhadi (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 13.

<sup>3</sup> Charles Kimbal, *op.cit.*, hlm. 73.

bahwa agama dapat membawa cikal bakal permusuhan serta kekerasan. Agama kerap diinstrumentalisasi menjadi senjata penghancur umat manusia demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Milenium baru yang seharusnya membawa harapan, malahan membawa kekhawatiran dalam hidup umat manusia.<sup>4</sup>

Kenyataan ini lalu menciptakan relasi antaragama yang jauh dari situasi damai. Setiap agama berusaha mengklaim kebenarannya sendiri tanpa mau terbuka terhadap pandangan agama lain. Hal ini diperparah lagi oleh usaha dari agama tertentu yang terlalu jauh ingin mencampuri urusan dalam bidang kehidupan bernegara. Dengan itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara selalu didasarkan pada prinsip dan doktrin kelompok agama tertentu. Kenyataan ini serentak memperjelas bahwa hanya ada satu jenis kebenaran yang dapat diterima, yakni kebenaran seturut agama tertentu saja. Padahalnya, suatu agama selalu bertolak dari pandangan normatif yang diajarkan oleh Kitab Sucinya semata. Hal ini tentu bertentangan dengan sistem demokrasi yang membuka peluang seluas-luasnya bagi perubahan nilai oleh masyarakat. Hal ini juga akan menimbulkan gesekan antarkelompok agama dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.<sup>5</sup>

Dalam konteks Indonesia, sejak awal berdirinya, Indonesia bukanlah sebuah negara teokratis. Hal ini berangkat dari kesadaran akan kebhinekaan yang ada di Indonesia. Kenyataan bahwa bangsa Indonesia bukan saja bhineka dalam hal suku, agama, dan ras, tetapi juga menyangkut tingkat evolusi kebudayaannya, mulai dari masyarakat yang paling sederhana sampai yang paling kompleks menjadi eksperimen dalam upaya pembentukan Indonesia sebagai negara-bangsa modern yang unik sekaligus berat.<sup>6</sup> Lebih lanjut, sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, telah diprediksi bahwa kebhinekaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia akan menjadi sumber konflik yang dapat merusak kehidupan bersama sebagai suatu bangsa yang utuh. Sebagai antisipasinya, Indonesia menetapkan diri sebagai negara demokrasi dengan ideologi Pancasila. Kesadaran akan pluralitas dan kebhinekaan

---

<sup>4</sup> Dr. Sindhunata, *loc. cit.*

<sup>5</sup> Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan; Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm. 285-286.

<sup>6</sup> E. Armando Riyanto, *Dialog Interreligius; Historitas, Tesis, Pergumulan, Wajah* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), hlm. 14.

terutama dalam hal agama ini dipertegas melalui konstitusi negara Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 UUD 1945. Akan tetapi, persoalan yang muncul adalah sejauh mana para pemeluk agama mengimplementasikan apa yang menjadi kesepakatan tersebut dalam suatu realitas historis yang terus berkembang dengan segala dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>7</sup>

Selama masa pemerintahan Orde Baru, ruang kebebasan bagi agama kerap kali dikebiri atas nama ideologi tunggal Pancasila. Situasi ini kembali berubah semenjak Indonesia memasuki fase reformasi. Situasi ini diawali dari masa pemerintahan Habibie dan berlanjut ke pemerintah Gusdur yang membuka ruang bagi kebebasan dan mempertegas demokrasi. Hal ini membuka peluang bagi ekspresi agama-agama dalam ruang publik. Sejak masa-masa inilah, Indonesia memasuki fase benturan ideologis yang sangat tajam. Ideologi agama kembali kuat berkembang dan sering hadir dalam bentuk kekerasan dan ekspresi emosional lainnya. Ideologi agama juga menjadi oposisi yang cukup kuat, meski dengan jumlah pendukung yang relatif kecil.<sup>8</sup> Hal ini tentu saja menjadi langkah sulit bagi bangsa ini untuk menjadikan kemajemukan sebagai faktor integral dalam kehidupan bersama.<sup>9</sup>

Benturan antarkelompok agama ini bukan hanya terjadi pada ruang-ruang diskusi publik. Kenyataan di lapangan juga mengafirmasi adanya benturan antarkelompok dan ideologi. Kekerasan fisik dan beberapa format pembunuhan massal yang bernuansa agama sudah berlangsung di beberapa wilayah selama masa reformasi. Di antaranya ada beberapa kasus besar seperti kasus di Poso, Ambon, Sunni di Jawa Timur, dan GKI Yasmin di Bogor.<sup>10</sup> Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa sampai dengan saat ini, agama masih terus dijadikan alat dan sarana untuk melanggengkan segala bentuk kekerasan baik dalam realitas politik, ekonomi dan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semangat keagamaan yang

---

<sup>7</sup> Muhamad A.S Hikam, *Islam, Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society* (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 2-3.

<sup>8</sup> Herdi Sahrasad dan Al Chaidar, *Fundamentalisme, Terorisme dan Radikalisme; Perspektif Atas Agama, Masyarakat dan Negara*, ed. Achyanuddin (Jakarta: Freedom Foundation & CSS-UI, 2017), hlm. 350.

<sup>9</sup> Firdaus M. Yunus, "Konflik Agama di Indonesia; Problem dan Solusi pemecahannya", *Jurnal Substansia*, 16:2 (Banda Aceh: Oktober 2014), hlm. 222.

<sup>10</sup> *Ibid.*

berlebihan cenderung mengancam ruang publik, baik pada level sistem politik maupun kehidupan sosial.<sup>11</sup>

Demi mengatasi konflik dan benturan antarkelompok agama di Indonesia, pembicaraan seputar tema toleransi dan kebebasan beragama menjadi selalu relevan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya kebebasan dan toleransi ini kerap kali salah kaprah. Toleransi yang dalam pengertiannya dipahami sebagai kekuatan yang memacu kerja sama dan saling pengertian satu sama lain serta dalam penggunaannya merujuk pada hubungan antarmanusia, kenyataannya tidak berjalan demikian. Dalam hidup beragama, toleransi justru dipakai untuk tujuan agar orang lain setuju atau memaklumi kebenaran ajaran suatu agama, bahkan yang hadir dalam bentuk kekerasan sekalipun. Tidak heran jika terdapat suatu pelanggaran yang mengatasnamakan agama dibiarkan terjadi begitu saja dengan dalil toleransi dan juga karena ketakutan terhadap tekanan. Situasi ini tentu menjadi potensi menciptakan konflik.<sup>12</sup>

Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa usaha untuk mencapai tujuan toleransi antarpemeluk agama ini harus dilandasi juga oleh perjumpaan antarkelompok agama. Karena itu, langkah alternatif yang dilihat cukup mendesak untuk dilakukan adalah melalui dialog antaragama. Dialog ini dimaksudkan agar hubungan antarumat beragama dapat terjalin dalam suasana positif dan konstruktif. Hal ini dapat berlangsung dalam hubungan antarpribadi dan para pemeluk dari agama-agama lain, yang diarahkan untuk saling memahami dan saling memperkaya, dalam ketaatan kepada kebenaran dan hormat terhadap kebebasan dan untuk menciptakan relasi yang damai di antara mereka.<sup>13</sup>

Akan tetapi, ada hal penting yang mesti diperhatikan dalam membangun dialog guna mewujudkan relasi yang damai antarpemeluk agama. Dalam membangun dialog, tentu harus ada suatu konsensus yang menjadi kesepakatan bersama dan menjadi norma yang mengikat. Konsensus ini akan menjadi pegangan bersama di tengah perbedaan pendapat, ajaran serta norma dari setiap agama. Mengingat dialog antaragama merupakan sebuah ruang perjumpaan yang bisa mengumbar prasangka dan curiga serta ketakutan bahwa kegiatan ini bisa

---

<sup>11</sup> Gusti A.B. Menoh, *Agama Dalam Ruang Publik* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), hlm. 191.

<sup>12</sup> E. Armando Riyanto, *op.cit.*, hlm. 400-402.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

melunturkan iman, maka suatu konsensus dalam membangun dialog untuk mencapai tujuan yang sama wajib untuk dijadikan pegangan bersama. Konsensus bersama itu dirumuskan dalam bentuk etik bersama; suatu etik global yang bisa dijadikan pegangan bersama tanpa ada norma-norma dari suatu agama.

Dalam membangun dialog demi penemuan konsensus bersama ini tentunya selalu ada halangan dari berbagai pihak yang menjadikan usaha tersebut kurang berjalan dengan baik. Hal ini berakar pada rasa curiga yang selalu muncul terhadap agama lain. Rasa curiga ini memang sudah sejak lama hadir bersamaan dengan munculnya agama-agama besar, terutama agama monotheis. Ada kecenderungan kuat dalam agama-agama besar itu untuk membedakan antara ‘orang beriman’ dan ‘orang kafir’. Distingsi inilah yang mempersempit wawasan universal ajarannya sendiri. Kelemahan dan keterlambatan ini yang kemudian disusul dengan cepat oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial dan politik, membuat agama juga ikut terseret olehnya dan sering kali menjadi bingung dan kikuk.<sup>14</sup>

Demi mengatasi rasa curiga dalam membangun dialog, etik global yang diprakarsai oleh Hans Küng merupakan rujukan dalam membangun etik bersama. Hal ini akan menjadi lebih relevan jika ditempatkan dalam konteks Indonesia dengan fakta pluralitas agamanya. Pasalnya, penyusunan proyek ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia yang mana agama mempunyai peranan penting dalam mewujudkannya. Karena itu, etik global yang menjadi konsensus dasar bersama, hendaknya menjadi pegangan dalam membangun dialog antaragama. Di samping itu, etik global juga merupakan tanggung jawab global yang menuntut tindakan praksis bagi semua pemeluk agama. Dialog dalam bentuk apapun akan menemukan artinya dalam bentuk praksis. Juga, praksis itu harus dibuat dari ‘akar rumput’. Dengan itu, pada akhirnya pemahaman terhadap agama lain melalui dialog akan membuat orang dapat melihat melalui “kacamata budaya lain”. “Kapasitas untuk berdialog merupakan kapasitas untuk berdamai”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> I. Bambang Sugiharto dan Agus Rachmat W., *Wajah Baru Etika dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 28.

<sup>15</sup> Syafaatun Almirzanah, Ph.D, “Perspektif Hans Küng dan Muslim Terhadap Dialog”, dalam Najiyah Martiam, M.A (ed.), *Jalan Dialog Hans Küng dan Perspektif Muslim* (Yogyakarta: CRCS Gadjah Mada, 2010), hlm. 51.

Melihat kenyataan ini, penulis merasa tertarik untuk mengulas tema tentang etik global Hans Küng sebagai jalan tengah dalam menyikapi konflik antaragama serta kecurigaan yang timbul antara para pemeluk agama. Penulis mengamini apa yang telah dicetuskan oleh Hans Küng sendiri bahwa tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian antaragama; tidak ada perdamaian di antara agama-agama tanpa dialog antaragama. Karena itu, dialog menjadi salah satu alternatif yang dirasa sangat mendesak untuk dilakukan guna membangun relasi yang damai antarpemeluk agama. Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin merangkai tulisan ini di bawah judul, “ETIK GLOBAL HANS KÜNG DAN RELEVANSINYA DALAM UPAYA MEMBANGUN RELASI YANG DAMAI ANTARAGAMA DI INDONESIA”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah pokok yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana relevansi etik global Hans Küng dalam upaya membangun relasi yang damai antaragama di Indonesia. Selanjutnya masalah utama ini kemudian diuraikan lagi dalam beberapa pertanyaan penuntun dalam penulisan tesis ini yaitu: *Pertama*, siapakah Hans Küng dan apa saja karya-karya intelektualnya? *Kedua*, apa itu konsep etik global Hans Küng? *Ketiga*, bagaimana membaca realitas konflik antaragama di Indonesia dalam terang pemikiran etik global Hans Küng? *Keempat*, apa relevansi etik global Hans Küng dalam upaya menciptakan relasi yang damai antarpemeluk agama di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Secara umum penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Hans Küng tentang etik global serta sumbangsih etik global dalam upaya membangun relasi yang damai antaragama di Indonesia. Tujuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut: *pertama*, memahami konsep etik global yang digagas oleh Hans Küng. *Kedua*, memahami kenyataan relasi antaragama di Indonesia. *Ketiga*, menemukan relevansi etik global Hans Küng dalam upaya membangun relasi yang damai antaragama.

Selain tujuan umum yang sudah dijabarkan tersebut di atas, terdapat tujuan khusus dalam penulisan tesis ini. Tujuan khusus dalam penulisan tesis ini dibuat dengan tujuan bagi penulis sendiri, yakni sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teologi dengan Pendekatan Kontekstual pada Program Studi Ilmu Agama/Theologi Katolik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

#### 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang hendak diperoleh dari tulisan ini adalah sebagai berikut. *Pertama* bagi para pemuka agama agar lebih bijak dalam memberikan pengajaran agama serta mendorong para pemeluknya untuk lebih terbuka terhadap pemeluk agama lain tanpa harus membandingkan mana agama yang lebih benar dan mana yang salah. Para pemuka agama hendaknya sadar bahwa relasi antaragama yang kurang baik dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan di Indonesia.

*Kedua*, bagi pemerintah Indonesia dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Pemerintah hendaknya lebih serius dan cepat tanggap memperhatikan persoalan kehidupan antaragama di Indonesia. Pemerintah dalam penanganan persoalan kehidupan antaragama, hendaknya tidak membuat klasifikasi prioritas antara agama mayoritas dan agama minoritas. Semua pemeluk agama berhak mendapat perlakuan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penanganan masalah terkait relasi antaragama di Indonesia harus mendapat perhatian lebih dan berlaku bagi semua agama. Selain itu, pemerintah juga hendaknya tidak menggunakan isu agama untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain.

*Ketiga*, bagi semua pemeluk agama di Indonesia. Para pemeluk agama hendaknya lebih mendalami ajaran agama sendiri tanpa harus mencampuri urusan agama lain. Selain itu, sikap terbuka, mau menghargai perbedaan agama lain, serta kesediaan untuk belajar dari agama lain sangatlah diperlukan dalam menjalin relasi antaragama.

*Keempat*, bagi penulis sendiri agar mampu menjalin relasi yang baik dengan pemeluk agama lain, guna menciptakan suatu tatanan kehidupan yang lebih baik seturut apa yang ditekankan oleh Hans Küng dalam naskah etik global. Hal penting

yang harus penulis lakukan sebelum memulai relasi dengan pemeluk agama lain adalah penulis terlebih dahulu memperdalam ajaran agama sendiri, kemudian penulis juga mempelajari tentang agama lain, guna bisa saling memperkaya satu sama lain. Di samping itu, penulis juga hendaknya melibatkan diri dalam pelbagai bentuk dialog antaragama guna memperkenalkan konsep etik global kepada peserta dialog guna bersama-sama mendorong upaya relasi yang damai antaragama.

### 1.5 Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode analisis kepustakaan. Penulis akan mengkaji tema tulisan dengan mengumpulkan beberapa sumber tertulis sebagai rujukan. Melalui metode ini, penulis membaca dan mengolah bahan ilmiah dari berbagai macam referensi dan beragam literatur untuk dijadikan sumber pustaka dalam tulisan ini.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibagi dalam lima bab.

BAB I adalah pendahuluan. Pada bab ini, penulis memaparkan enam poin penting yakni, latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II adalah pembahasan tentang Hans Küng dan karya-karyanya. Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang riwayat hidup Hans Küng dan karya-karyanya. Selain itu, penulis juga akan menyebutkan beberapa tokoh yang memiliki andil dalam pemikiran-pemikirannya.

BAB III adalah pembahasan tentang etik global. Pada bab ini, penulis juga akan membahas tentang lahirnya dokumen etik global, isi dokumen etik global, juga bagaimana dokumen itu dapat diterima dalam parlemen agama. Pada bagian ini juga akan dibahas agama sebagai bagian penting dalam etik global. Penulis juga akan menampilkan beberapa kritik terhadap dokumen etik global.

BAB IV adalah pembahasan inti tulisan. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan relevansi etik global Hans Küng dalam upaya membangun relasi yang damai antaragama di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dibagi dalam empat bagian. Bagian pertama adalah realitas relasi kehidupan antaragama di Indonesia. Bagian kedua adalah tantangan dan peluang pluralisme agama di Indonesia dalam



mewujudkan etik global. Bagian ketiga adalah relevansi etik global dalam menciptakan relasi yang damai antaragama. Dan yang terakhir, bagaimana merumuskan bentuk dialog yang sesuai dengan konteks di Indonesia dalam mewujudkan relasi yang damai antaragama.

BAB V adalah penutup, berupa kesimpulan dan rekomendasi.